



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 100.3.3.2/KEP. 0004 /BPKAD/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:
100.3.3.2/KEP.0463/BPKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengeluaran keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Morowali Nomor: 100.3.3.2/KEP.0463/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 100.3.3.2/KEP.0463/BPKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Morowali Nomor: 100.3.3.2/KEP.0463/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 pada lampirannya, Sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP.0094/BPKAD/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:
100.3.3.2/KEP.0463/BPKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KET
1	DINAS PENDIDIKAN DAERAH	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH		
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	- UPT PUSKESMAS ULUNAMBO		KEPALA UPT PUSKESMAS ULUNAMBO	
	- UPT PUSKESMAS KALEROANG		KEPALA UPT PUSKESMAS KALEROANG	
	- UPT PUSKESMAS LAFEU		KEPALA UPT PUSKESMAS LAFEU	
	- UPT PUSKESMAS BAHODOPI		KEPALA UPT PUSKESMAS BAHODOPI	
	- UPT PUSKESMAS BAHOMOTEFÉ		KEPALA UPT PUSKESMAS BAHOMOTEFÉ	
	- UPT PUSKESMAS BUNGKU		KEPALA UPT PUSKESMAS BUNGKU	
	- UPT PUSKESMAS WOSU		KEPALA UPT PUSKESMAS WOSU	
	- UPT PUSKESMAS BAHONSUAI		KEPALA UPT PUSKESMAS BAHONSUAI	
	- UPT PUSKESMAS LAANTULA JAYA		KEPALA UPT PUSKESMAS LAANTULA JAYA	
	- UPT PUSKESMAS TANJUNG HARAPAN		KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG HARAPAN	
	- UPT PUSKESMAS FONUASINGKO		KEPALA UPT PUSKESMAS FONUASINGKO	
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALABANGKAPAKU		DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALABANGKAPAKU	
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI		DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI	
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH		
			PURWANTO, ST NIP. 19720801 200701 1 017	BIDANG SUMBER DAYA AIR

			SRI WAHYUNI, ST, MM NIP. 19780716 200903 2 004	BIDANG BINA MARGA
			FITRAUDIN BADA, ST NIP. 19780805 200801 1 007	BIDANG TATA RUANG
			MUNAWIR, ST, MM NIP. 19760404 200212 1 007	BIDANG JASA KONSTRUKSI
			IKRAMUDIN ZEN, ST NIP. 19680511 200012 1 003	BIDANG PERENCANAAN DAN SARANA PRASARANA UTILITAS KOTA
			SUHARDIN SAMSUDIN, ST, MM NIP. 19770712 200212 1 009	BIDANG CIPTA KARYA
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH		
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
9	DINAS SOSIAL DAERAH	KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH		
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH		
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH		
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
15	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH		
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
17	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
19	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DAERAH	KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DAERAH		
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
21	DINAS PERIKANAN DAERAH	KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH		
22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		

23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
24	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH		
	- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
	- BAGIAN HUKUM		KEPALA BAGIAN HUKUM	
	- BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	- BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
	- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	- BAGIAN UMUM		KEPALA BAGIAN UMUM	
	- BAGIAN ORGANISASI		KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
	- BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	- BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
25	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DEWAN		
26	INSPEKTORAT DAERAH	KEPALA INSPEKTORAT DAERAH		
27	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			ALWI, S.Sos NIP. 19820917 200701 1 003	KHUSUS DANA DESA
29	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
31	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN	CAMAT MENUI KEPULAUAN		
	- KELURAHAN ULUNAMBO		LURAH ULUNAMBO	
32	KECAMATAN BUNGKU SELATAN	CAMAT BUNGKU SELATAN		
33	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	CAMAT BUNGKU TENGAH		
	- KELURAHAN MARSAOLEH		LURAH MARSAOLEH	

	- KELURAHAN LAMBEREA		LURAH LAMBEREA	
	- KELURAHAN TOFOISO		LURAH TOFOISO	
	- KELURAHAN MATANO		LURAH MATANO	
	- KELURAHAN BUNGI		LURAH BUNGI	
	- KELURAHAN MENDUI		LURAH MENDUI	
34	KECAMATAN BUNGKU BARAT	CAMAT BUNGKU BARAT		
35	KECAMATAN BAHODOPI	CAMAT BAHODOPI		
36	KECAMATAN BUMI RAYA	CAMAT BUMI RAYA		
37	KECAMATAN WITA PONDA	CAMAT WITA PONDA		
38	KECAMATAN BUNGKU TIMUR	CAMAT BUNGKU TIMUR		
39	KECAMATAN BUNGKU PESISIR	CAMAT BUNGKU PESISIR		
40	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN	CAMAT SOMBORI KEPULAUAN		

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya.
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


 BAHDIN BAID, S.H.,M.H
 Pembina Tkt I, IV/b
 NIP. 19820602 200604 1 005